

Judul : Menara Angkuh Mahkamah Kehormatan DPR
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Menara Angkuh Mahkamah Kehormatan DPR

Rusman Ghazali

Guru Besar Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Universitas Nasional

Pimpinan DPR meminta masyarakat menghormati putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pemberian sanksi etik kepada tiga anggota, dan dua anggota yang dibebaskan dari sanksi etik. Putusan MKD dibuat dalam dua kategori. Pertama, sanksi penonaktifan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI selama tiga atau enam bulan ke depan karena terbukti melanggar etik. Kedua, Adies Kadir dan Surya Utama dinyatakan tidak bersalah, tidak diberi sanksi etik, dan segera aktif kembali sebagai anggota DPR.

Keputusan yang sangat simpel, tanpa argumentasi kokoh penyerta keputusan itu. Hanya ada alasan bahwa para anggota DPR yang dimaksud dianggap tidak bijak menanggapi protes publik tentang munculnya wacana pembubaran DPR karena menaikkan gajinya di tengah keterpurukan ekonomi rakyat. Padahal, peristiwa itu amat perih, mengakibatkan korban kemanusiaan, puluhan orang meninggal, lebih banyak lagi yang terluka, kerugian material karena huru-hara dan kerusakan fasilitas publik di berbagai tempat akibat unjuk rasa.

Keputusan MKD menggambarkan sanksi yang tidak bermakna apa-apa untuk memulihkan kepercayaan publik. Seakan perilaku anggota DPR dengan peristiwa unjuk rasa 25 Agustus 2025 tidak punya kausalitas. Sebagai konstituen, publik punya hak politik mengetahui, bagaimana metode kerja MKD dalam menentukan kadar kesalahan dan argumentasi penentuan sanksi kepada anggota DPR?

Pelanggaran etik anggota DPR seperti perilaku klasik, berulang dari waktu ke waktu dalam beragam kasus. Sejauh ini belum pernah ada keputusan MKD yang diapresiasi

publik sebagai keputusan obyektif. MKD sekadar formalisme untuk saling melindungi perilaku menyimpang antarpara anggota DPR.

Padahal, praktik etika selama ini dilembagakan untuk mengontrol perilaku anggota parlemen di banyak negara, dan diwujudkan dalam bentuk aturan mengikat (*standing orders*). Perilaku dalam bentuk perbuatan dan pernyataan anggota parlemen harus terukur. Mengapa? Karena perilaku menyimpang anggota parlemen senantiasa menciptakan dua konsekuensi.

Satu, dampak langsung, perilaku yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang, seperti praktik korupsi, pernyataan kontroversial, dan memprovokasi keonaran di ruang publik seperti yang terjadi dalam demonstrasi akhir Agustus lalu. Dua, implikasi tidak langsung, perilaku yang berpotensi menimbulkan persoalan publik. Ketika anggota parlemen salah mengagregasi aspirasi rakyat, maka fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pasti tidak dilakukan secara normal. Kondisi inilah yang terus memproduksi ketidakadilan di Indonesia.

Terhadap kedua keadaan itu, terbaca bahwa MKD DPR tidak punya metode kerja, perilaku tidak adil, dan memicu amarah rakyat tapi disanksi sangat ringan. Padahal, perilaku para anggota DPR itu masuk kategori pelanggaran etik berat, berdampak langsung memicu huru-hara.

Keputusan MKD menunjukkan keangkuhan, abai pada isu esensial untuk membangun peradaban politik baru. Tak terbaca kesungguhan menjadikan lembaga DPR sebagai perwakilan rakyat yang demokratis dan kredibel.

Mereformasi diri

Keberadaan MKD dan DPR seperti tidak berdampak signi-

fikan dalam mengartikulasi kepentingan publik, yang seharusnya menjadi lembaga pemandu penegak etika ketat.

Keadaan ini yang terus memantik pesimisme di ruang publik. Para anggota DPR harus menyadari bahwa ia pemain utama dalam penyelenggaraan negara. Penentu nasib dan peradaban politik bangsa. Mesti menyadari bahwa dalam diri lembaga DPR kini ada hal yang harus diperjuangkan, yakni melawan krisis demokrasi representatif.

Kepercayaan publik pada DPR sangat krusial dan merupakan pilar utama penentu legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan tugas fungsi lembaga. Untuk dapat berkontribusi signifikan bagi kepentingan rakyat, DPR harus lebih awal memulihkan kepercayaan publik dengan penegakan etika yang ketat. Fenomena menunjukkan bahwa aktivisme publik menjadi faktor baru yang hampir setiap hari mengirim pesan politik tentang "marginalisasi DPR" sebagai lembaga perwakilan.

Publik menilai, lembaga DPR seperti sudah usang di semua aspek. Fungsi-fungsi etik sebagai kunci kepercayaan publik juga tidak pernah dijemakan DPR sebagai lembaga representasi rakyat. DPR mestinya menjadi forum utama untuk debat-debat kebijakan yang bermutu, tapi kini justru makin tertinggal, diambil alih forum media *mainstream*, seperti medsos dan media cetak.

Menguatkan kepercayaan pada lembaga DPR jauh lebih penting daripada sekadar mengutamakan kepentingan partai politik. Lembaga DPR bukan hanya fitur utama dalam sistem demokrasi, melainkan harus menjadi elemen kunci dalam membentuk sistem parlementaria yang kuat dan fungsional untuk peradaban politik yang adil.